

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4.
- Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 7
- B.D. Sri Marsita , *Kewenangan Kejaksaan Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*, ( Jakarta:miswar, 2013), Hlm. 4.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: djambatan, 2008), Hlm. 29.
- Evy Lusia Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta, 2013, Hal 4.
- Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia – Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 36.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal. 54.
- H.Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), Hlm 51.
- Irwan Jusuf, *Simposium Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung 1977 hal. 176.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), Hlm. 61.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 136.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018) , Hlm. 18.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal . 334.

Rahmad Rosyad, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 73-77.

Ropaum Rambe, Teknik Praktek Advokat, PT. Grasindo, Jakarta, 2003, hal 6-7.  
Sartono dan Bhkti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 2

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebagai Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 160-161

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 731.

## **B. Karya Ilmiah**

Agus Kelana Putra, Faisal Rani, Mahdi Syahbandir, “*EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA*”, Syiah Kuala Law Jurnal, Volume 1, No.2. Agustus 2017, Hal 178.

Dita Mahandari, I Nyoman Gede Remaja, “*PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BULELENG*” Jurnal Hukum Volume 7 No. 1, Agustus 2019, Hal 112.

Florenshia, “*TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN ATAS HAK MILIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM*” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 6 September 2018, Hal. 7

Juristoffel Simanjuntak, “*KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (TUN)*” Jurnal Lex Privatum Volume VI No. 1 Januari-Maret 2018, Hal. 153.

Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, “*KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM LINGKUP PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA*”, Jurnal Yustika Volume 21 No.2 Desember 2018, Hal. 19.

Nirwan Yunus, dan Lucyana Djafaar, “*EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO*” Jurnal De Jure, Volume 20, No. 3, Oktober 2008 , Hal. 554.

Rusdianto, “FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 6, No. 1 Juni 2015, Hal 108.

Sunarjo, “ETIKA PROVESI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME PENEGAKAN HUKUM”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 18, No. 2, Desember 2013, hal 186.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang bentuk kerugian Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/ AJ/ 12/ 2010 (Yang sudah di perbarui dengan nomor 18 Tahun 2014) tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/J/A/11/2015 Tentang Petunjuk pelaksanaan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

### **D. Lain-lain**

Agustina,Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117 dalam <http://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 16 Januari 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru), (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009), Hal.197

Kejaksaan, “Pengertian Kejaksaan” [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) diakses pada tanggal 27 Januari 2020

Kejaksaan, “Logo dan Makna” [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=4](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=4) diakses pada tanggal 27 Januari 2020

Pengadilan Negeri Surabaya, “Putusan no 1235/Pdt.G/2019/PN Sby” [https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada tanggal 11 juni 2020

Wawancara dengan Ibu Lulu Eny S.H selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin 09 Maret 2020 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bpk Soegeng Prakoso.S.H selaku Kepala Sub Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa 13 April 2020 pukul 13.20 WIB.